



Sanggau Pertahankan WTP Lima Kali Beruntun Reward Minimal Rp5 M, Aset Jadi Tantangan



SUGENG/PONTIANAKPOST

WTP: Kepala KPPN Sanggau, Bulus Lumban Gaol menyerahkan Piagam WTP kepada Bupati Sanggau, Paolus Hadi.

Ada reward untuk Opini Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Masuknya di tahun 2020 atau mungkin di akhir tahun 2019. Besarannya belum dipastikan. Tahun sebelumnya minimal Rp5 miliar. Bisa jadi tahun ini lebih atau sama seperti tahun sebelumnya. Itu yang dikemukakan Bupati Sanggau, Paolus Hadi, yang kali ini Pemkab menerima WTP. Untuk kelimahalnya secara beruntun.

PEMDA Kabupaten Sanggau kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk lima kali beruntun sejak 2014. Penyerahan piagam WTP dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Sanggau pada Rabu (16/10) pagi.

Kepala KPPN Kabupaten Sanggau, Bulus Lumban Gaol menyampaikan, penyerahan piagam WTP dilakukan terkait laporan keuangan Pemerintah

SUGENG, Sanggau

◆ Ke Halaman 23 Kolom 1

Reward Minimal Rp5 M, Aset Jadi Tantangan

Sambungan dari halaman 17

Daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2018.

"Ini merupakan penghargaan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku bendahara umum negara," katanya.

"Biasanya memang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan kepada pimpinan di daerah, tetapi untuk tahun ini diserahkan oleh direktorat jendral per-

bendaharaan kepada bupati. Ini adalah capaian dari kinerja pengelola keuangan untuk APBD tahun anggaran 2018," ujar dia.

Atas keberhasilan tersebut, Kementerian Keuangan RI memberikan reward.

"Nanti itu masuknya di tahun 2020 atau mungkin di tahun 2019. Mengenai besarannya, saya belum bisa memastikan. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya minimal lima miliar rupiah.

Untuk tahun ini bisa lebih atau bisa sama seperti tahun sebelumnya," tegas dia.

Sementara itu, Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyampaikan bahwa persoalan aset masih menjadi tantangan kedepan yang akan menjadi fokus penyelesaian Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

"Kemarin juga pada saat rapat pimpinan saya minta dibenahi, karena persoalan aset ini tidak mudah. Kalau

anggarannya dari APBD, apakah menjadi aset daerah ataukah kita serahkan ke pihak lain. Contoh misalnya ada belanja untuk masyarakat, beli hand tractor. Nah ketika kita serahkan ke masyarakat melalui kelompok tani harus ada bukti penyerahan berarti itu sudah menjadi kelompok tani. Hal-hal seperti itulah yang kita benahi sekarang," jelas orang nomor satu di Sanggau itu. (*)